

Katalog : 9302020.3571

ISSN 2986-5743

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA KEDIRI MENURUT PENGELUARAN 2019-2023 VOLUME 10, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KEDIRI**

Katalog : 9302020.3571

ISSN 2986-5743

**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KOTA KEDIRI
MENURUT PENGELUARAN
2019-2023
VOLUME 10, 2024**

<https://kedirikota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KEDIRI**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA KEDIRI MENURUT PENGELUARAN 2019 - 2023

Volume 10, 2024

ISBN:

Nomor Publikasi: 35710.24004

Katalog: 9302020.3571

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv+74 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Pembuat Kover :

Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Penerbit :

Badan Pusat Statistik Kota Kediri

<https://kedirikota.bps.go.id>

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA KEDIRI
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023**

Volume 10, 2024

Penanggung Jawab

Drs. Parjan, M.Si.

Koordinator

Dra. Dyah Retnani Pariningtyas, M.Si.

Penyunting

Listiana, S.ST.

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Dra. Dyah Retnani Pariningtyas, M.Si.

Penata letak

Listiana, S.ST.

<https://kepripta.bptspid>

Kata Pengantar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat kecepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi “PDRB Kota Kediri Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023” ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Net ekspor Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Untuk mempermudah keterbandingan antar tahun, penghitungan data PDRB menurut pengeluaran menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah disesuaikan dengan konsep *System of National Accounts (SNA) 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah mendukung penerbitan publikasi ini. Semoga publikasi ini banyak memberikan manfaat bagi para pengguna. Saran dan tanggapan sangat diharapkan agar publikasi ini dapat disajikan dengan lebih baik pada edisi yang akan datang.

Kediri, April 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA KEDIRI



Drs. Parjan, M.Si.

DAFTAR ISI
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA KEDIRI
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023
Volume 10, 2024

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
1. Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	7
1.3 Kegunaan Statistik PDRB	10
2. Metode Estimasi dan Sumber Data	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	20
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22
2.5 Perubahan Inventori	25
2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa	28
3. Tinjauan Perekonomian Kota Kediri Menurut PDRB Pengeluaran 2019-2023	31
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	33
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	42
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	45
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	46
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	48
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	49
3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa	50
4. Perkembangan Agregat PDRB Pengeluaran Kota Kediri 2019-2023	53
4.1 PDRB (Nominal)	55
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	56

4.3 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	57
5. Penutup	59
Daftar Pustaka	63
Lampiran	67

<https://kedirikota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri (miliar rupiah), 2019-2023	33
3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kota Kediri (miliar rupiah), 2019-2023	35
3.3 Distribusi PDRB Komponen Pengeluaran (Tidak Termasuk Net Ekspor) Kota Kediri (persen), 2019-2023	37
3.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri (persen), 2019-2023	38
3.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kediri (persen), 2019-2023	40
3.6 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023	41
3.7 Laju implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023	42
3.8 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Kediri, 2019-2023	44
3.9 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Kediri, 2019-2023	45
3.10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Kediri, 2019-2023	47
3.11 Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Kediri, 2019-2023	49
3.12 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Kediri, 2019-2023	50
3.13 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Kediri, 2019-2023	52
4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Kediri, 2019-2023	55
4.2 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Kediri, 2019-2023	57
4.3 Rasio Output Penambahan Modal Produksi Kota Kediri, 2019-2023	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023	34
3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023	36
3.3 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023	36
3.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023	39
3.5 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023	40

<https://kedirikota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri (miliar rupiah), 2019-2023	69
2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kediri (miliar rupiah), 2019-2023	70
3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri (persen), 2019-2023	71
4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kediri (persen), 2019-2023	72
5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Komponen Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023	73
6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Komponen Pengeluaran Kota Kediri (persen), 2019-2023	74

<https://kedirikota.bps.go.id>

1 PENDAHULUAN

PDRB MENURUT PENDEKATAN PENGELUARAN



PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU & PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.



KEGUNAAN PDRB

PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.

Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi,
12. Real Estat,

13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
2. pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga
3. pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
4. pembentukan modal tetap domestik bruto
5. perubahan inventori
6. net ekspor (ekspor dikurangi impor)

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil akhir dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta net ekspor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Namun, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk:

- i) Memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi;
- ii) Memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan
- iii) Mengontrol kelayakan hasil estimasi.

Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan Konsumsi Akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk Permintaan Akhir. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Net ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Pendapatan (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai Output Akhir (*final output*). Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan identik dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan "riil"
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai Net ekspor.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan riil, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatnya nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*central bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda *FISIM* (*financial intermediation services indirectly measured/FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*references*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

1.3 Kegunaan Statistik PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://kedirikota.bps.go.id>

2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Sumber data:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
- Jumlah penduduk pertengahan tahun.
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu.
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

Metode Estimasi

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung underestimate, maka perlu dilakukan penyesuaian (adjustment), yaitu digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai dari berbagai sumber data di luar Susenas.

1



Metode Estimasi

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP.

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) merupakan bagian dari pengeluaran lembaga non profit (LNP).

Sumber data:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil up-dating direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2

Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri.

Sumber data:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat Tingkat I dan Tingkat II dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

Metode Estimasi

a. PK-P Kabupaten ADHB

PK-P ADHB =

Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

b. PK-P Kabupaten ADHK

PK-P ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi.

3

Metode Estimasi

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk yang menjadi barang modal di berbagai industri.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu.

Sumber data:

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- Nilai impor dua digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat yang dikumpulkan datanya oleh BPS Provinsi.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.
- Laporan keuangan perusahaan.
- dll

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

4

Perubahan Inventori (PI)

Inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi.

Sumber data:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia.
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD.
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan.
- dll

Metode Estimasi

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

5



Net Ekspor Barang Dan Jasa

Ekspor impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri). Net Ekspor merupakan selisih antara ekspor dan impor.

Sumber data:

Nilai ekspor/impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha.

6

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplai* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflasi PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;

4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah disesuaikan;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) merupakan bagian dari pengeluaran lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah non profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT ADH Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflasi PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni,

pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup: a. PK-Pemerintah Pusat yang berada di wilayah kabupaten; b. PK-Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Propinsi yang berada di wilayah kabupaten; d. PK-Pemerintah Desa yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan.

iv. Penghitungan PK-P Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat Tingkat I dan Tingkat II dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten, PK-P kabupaten ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah pusat dan propinsi yang berada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa yang berada di wilayah kabupaten tersebut.

b. PK-P Kabupaten ADHK

PK-P ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari PDRB komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- Nilai impor dua digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat yang dikumpulkan datanya oleh BPS Provinsi.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (ADH) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK 2010, maka PMTB ADHB tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK 2010.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADHK 2010 dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK 2010 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK 2010 tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK 2010 di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain.

Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB ADHK 2010 adalah dengan cara *men-deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan *men-deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK 2010 diperoleh dengan *men-deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan cara mendeflasi nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 Perubahan Inventori (PI)

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu

periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;

- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori ADHK 2010, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan

IHPB akhir tahun;

- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK 2010 dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 Net Ekspor Barang Dan Jasa

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut

memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor impor dari dan ke suatu wilayah.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri). Net Ekspor merupakan selisih antara ekspor dan impor.

iii. Cakupan

Net Ekspor suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar propinsi lain ke/dari kabupaten tersebut
- c. Ekspor/impor jasa dari/ke kabupaten/kota lain ke/dari kabupaten tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

iv. Sumber Data

Nilai ekspor impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha.

3 TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA KEDIRI MENURUT PDRB PENGELUARAN 2019-2023

PDRB ADHB
KOTA KEDIRI 2023

159.749,94
Miliar Rupiah

PDRB ADHB Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai 159.749,94 miliar rupiah

PDRB ADHB
KOTA KEDIRI 2023

91.631,35
Miliar Rupiah

PDRB ADHB Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai 91.631,35 miliar rupiah

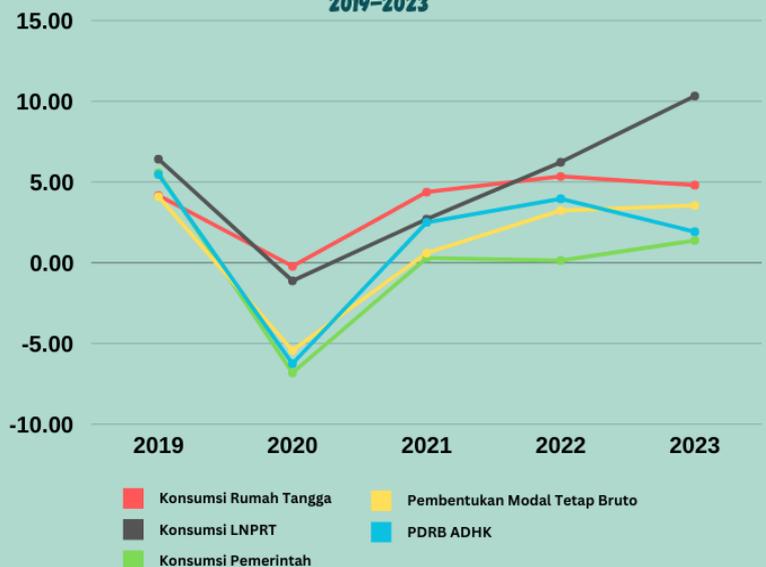
Komponen Terbesar pada PDRB Pengeluaran Tahun 2023 adalah Konsumsi Rumah Tangga

DISTRIBUSI PDRB ADHB MENURUT PENGELUARAN (TANPA NET EKSPOR),
2019-2023



Laju Pertumbuhan Tertinggi pada Tahun 2023 adalah Komponen LNPRT

PERTUMBUHAN PDRB ADHB 2010 MENURUT PENGELUARAN,
2019-2023



BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA KEDIRI MENURUT PDRB PENGELUARAN 2019-2023

3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran

Selama kurun waktu 2019-2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Kediri berdasarkan PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel 3.1. Nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam penghitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Nilai PDRB ADHB Kota Kediri selama kurun waktu 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB ADHB Kota Kediri mencapai 139.244,87 miliar rupiah. Dalam rentang lima tahun, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 159.749,94 miliar rupiah pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen pembentuknya mulai dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, maupun ekspor impor.

**Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri (miliar rupiah),
2019-2023**

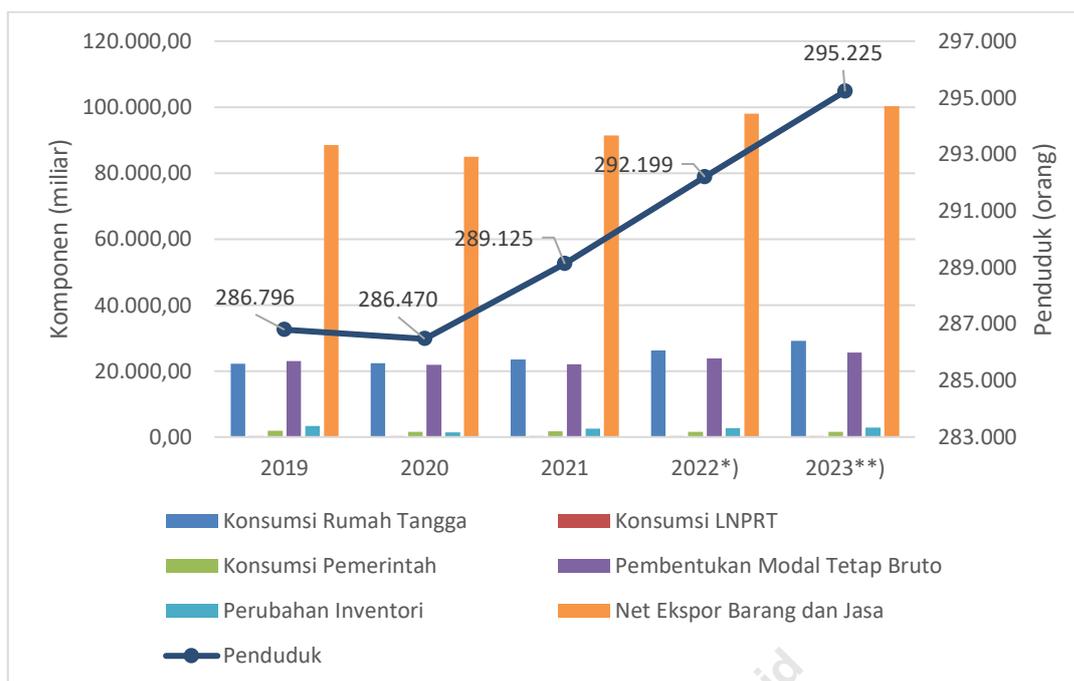
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	22.263,86	22.377,11	23.495,87	26.297,11	29.086,68
2 Konsumsi LNPRT	267,16	268,72	281,50	306,34	341,20
3 Konsumsi Pemerintah	1.824,58	1.600,61	1.673,88	1.576,24	1.644,22
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.033,56	21.841,36	22.024,97	23.759,07	25.583,01
5 Perubahan Inventori	3.330,33	1.360,43	2.614,64	2.775,14	2.823,82
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	88.525,38	84.957,82	91.376,26	98.064,36	100.271,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	139.244,87	132.406,06	141.467,12	152.778,31	159.749,94

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Perkembangan nilai ekonomi Kota Kediri berdasarkan PDRB ADHB menurut komponen pembentuknya dan fluktuasinya dapat dilihat pada tabel 3.1 dan gambar 3.1.

Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023



*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sedangkan pada periode tahun 2019-2023, PDRB Kota Kediri Atas Dasar Harga Berlaku secara umum mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, yang tiap tahunnya berkisar antar 9 hingga 12 triliun. Nilai PDRB Kota Kediri tahun 2019-2023 yakni sebesar; 139.244,87 miliar rupiah (2019); 132.406,06 miliar rupiah (2020); 141.467,12 miliar rupiah (2021); 152.778,31 miliar rupiah (2022) dan 159.749,94 miliar rupiah (2023). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB dari sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB Pengeluaran. Fluktuasi PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Kediri pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 3.1 dan gambar 3.1 di atas.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Fluktuasi nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Kediri pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 3.2 dan gambar 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kota Kediri (miliar rupiah),
2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022^{*)}	2023^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	15.581,85	15.547,13	16.228,24	17.097,12	17.920,02
2 Konsumsi LNPRT	159,07	157,29	161,54	171,61	189,33
3 Konsumsi Pemerintah	1.113,81	1.037,85	1.040,89	1.042,35	1.056,77
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.599,74	15.697,94	15.792,31	16.304,12	16.882,43
5 Perubahan Inventori	1.558,44	636,46	1.152,18	1.215,51	1.182,43
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	54.988,61	51.298,31	52.080,43	54.076,49	54.400,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	90.001,52	84.374,98	86.485,59	89.907,21	91.631,35

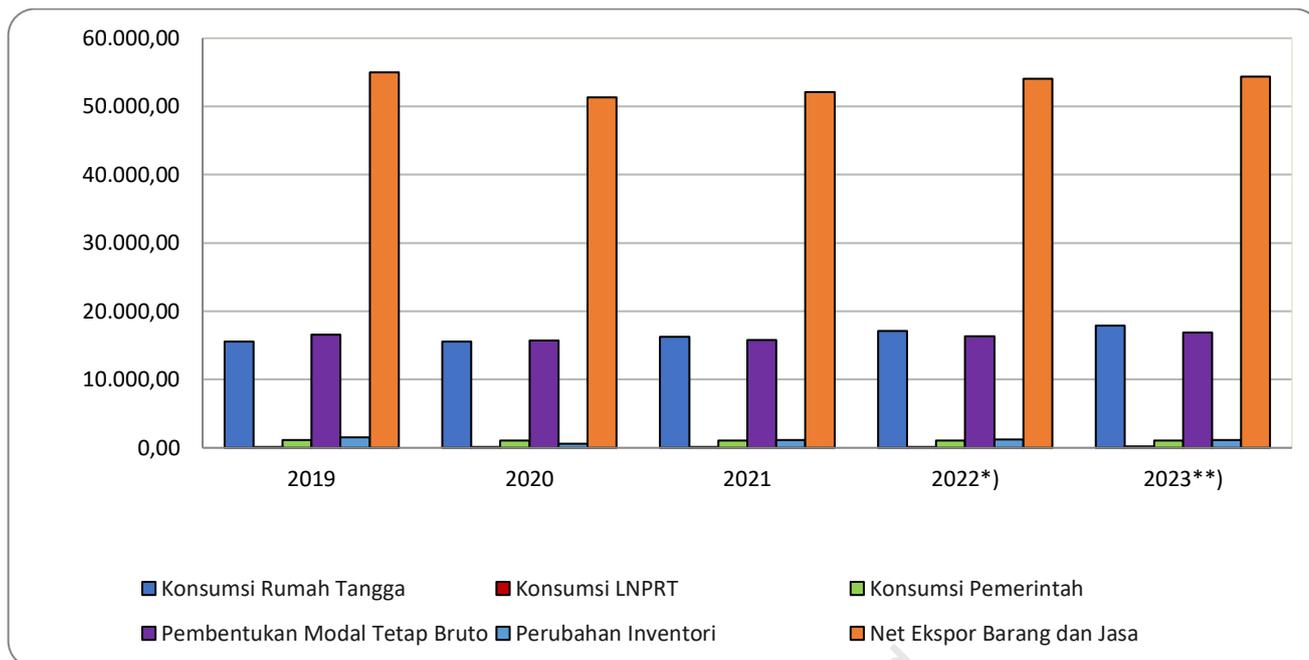
^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Dari tabel 3.2, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Kediri berfluktuasi selama kurun waktu 2019-2023, yakni sebesar 90.001,52 miliar rupiah (2019); 84.374,98 miliar rupiah (2020); 86.485,59 miliar rupiah (2021); dan 89.907,21 miliar rupiah (2022). Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Kediri tahun 2023 mencapai 91.631,35 miliar rupiah, atau meningkat sebesar 1,81 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Namun jika dibandingkan dengan nilai PDRB ADHK tahun 2022, PDRB ADHK tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,92 persen.

Gambar 3.2 memperlihatkan fluktuasi nilai PDRB ADHK menurut komponen. Nilai PDRB ADHK mengalami kontraksi pada tahun 2020, yang artinya volume permintaan atau konsumsi akhir tahun tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 84.374,98 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 terus menunjukkan peningkatan. Dilihat dari masing-masing komponen pada tahun 2023 semuanya menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Kontraksi PDRB termasuk komponennya terjadi di tahun 2020

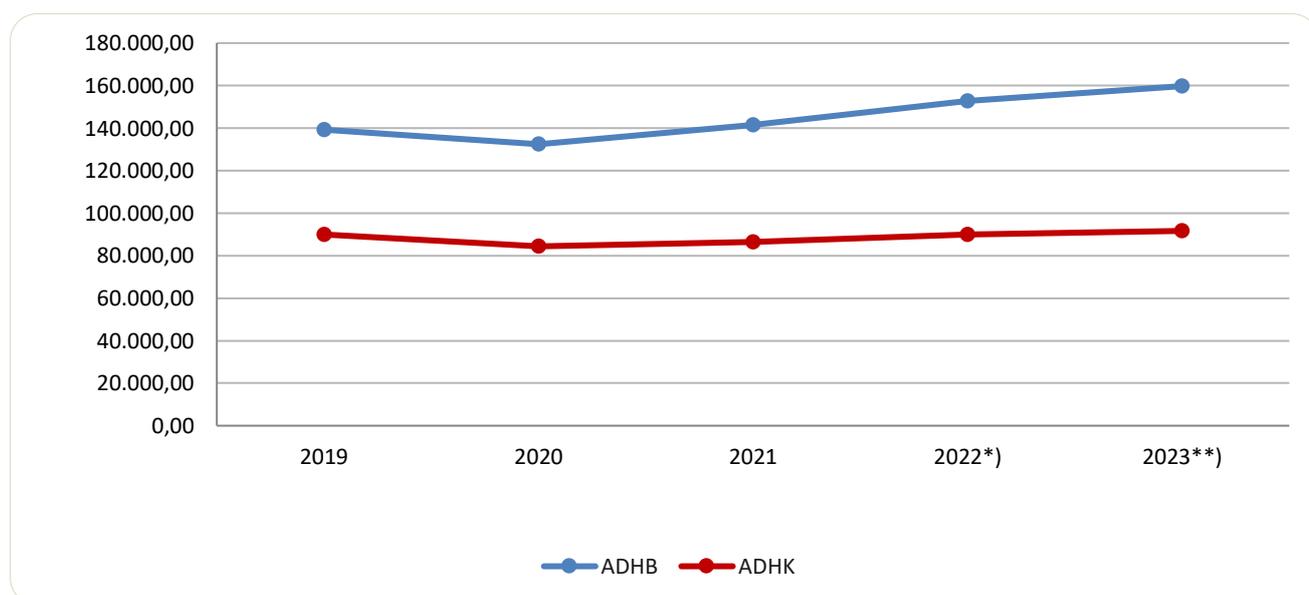
Gambar 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023



*) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Dari gambar 3.3, terlihat bahwa nilai PDRB ADHB selalu lebih tinggi dari PDRB ADHK. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB ADHK, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan.

Gambar 3.3 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023



*) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB Pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Net Ekspor Barang dan Jasa (E) atau ekspor dikurangi impor barang dan jasa. Tiap daerah memiliki komposisi kontribusi masing-masing komponen yang berbeda-beda dalam membentuk nilai PDRB total. Pada umumnya, komponen pengeluaran dari konsumsi akhir rumah tangga merupakan komponen yang paling banyak menyumbang kontribusi dalam membentuk nilai PDRB di wilayah-wilayah Indonesia. Namun khusus untuk Kota Kediri dimana penyumbang nilai terbesar PDRB menurut lapangan usaha berasal dari kategori Industri Pengolahan mengakibatkan besarnya kontribusi komponen Ekspor keluar daerah dalam pembentukan nilai PDRB Pengeluaran. Untuk itu, komponen Net Ekspor perlu dihilangkan terlebih dahulu untuk melihat kontribusi komponen pengeluaran lainnya terhadap PDRB Kota Kediri.

**Tabel 3.3 Distribusi PDRB Komponen Pengeluaran (Tidak Termasuk Net Ekspor)
Kota Kediri (persen), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	43,90	47,16	46,91	48,06	48,90
2 Konsumsi LNPRT	0,53	0,57	0,56	0,56	0,57
3 Konsumsi Pemerintah	3,60	3,37	3,34	2,88	2,76
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	45,41	46,03	43,97	43,42	43,01
5 Perubahan Inventori	6,56	2,87	5,22	5,07	4,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2019-2023, jika dikurangi dengan besarnya Net Ekspor atau hanya khusus kelompok pengeluaran dan inventori (*stock*), PDRB Kota Kediri didominasi untuk memenuhi kebutuhan investasi fisik dalam bentuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) dan kebutuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Terjadi pergeseran selama tahun 2019 – 2023 yaitu pada tahun 2019 didominasi oleh pengeluaran PMTB sedangkan PKRT berada di urutan kedua. Akan tetapi pada tahun 2020-2023 kondisi berubah menjadi PKRT yang paling dominan dalam struktur komponen PDRB Pengeluaran Kota Kediri dengan besaran antara 46 persen sampai dengan 49 persen.

**Tabel 3.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kota Kediri (persen), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	15,99	16,90	16,61	17,21	18,21
2	Konsumsi LNPRT	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21
3	Konsumsi Pemerintah	1,31	1,21	1,18	1,03	1,03
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,54	16,50	15,57	15,55	16,01
5	Perubahan Inventori	2,39	1,03	1,85	1,82	1,77
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	63,58	64,16	64,59	64,19	62,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

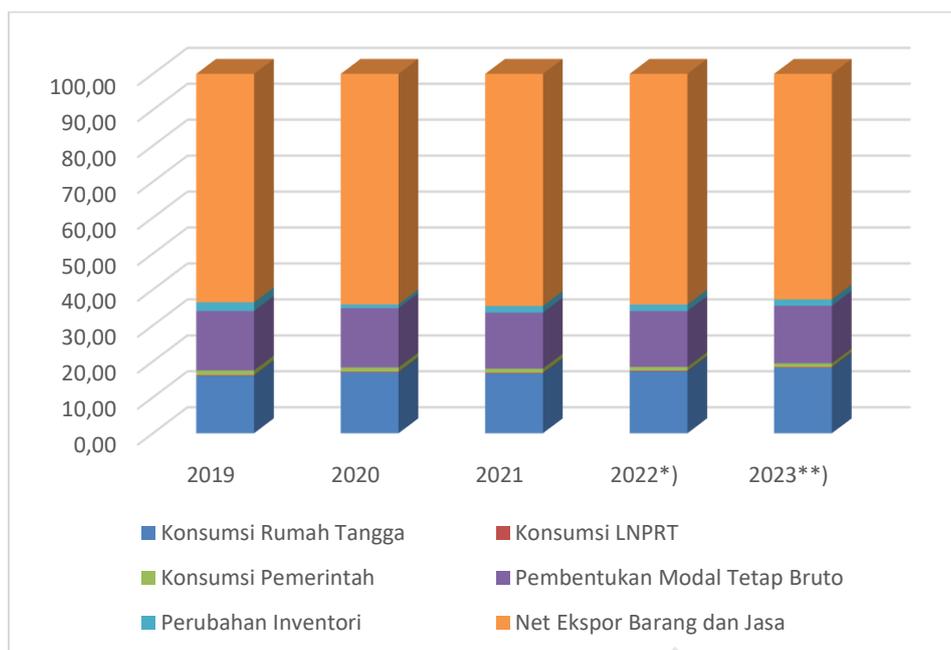
*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Jika dilihat distribusi PDRB Pengeluaran secara keseluruhan pada tabel 3.4, komponen Net Ekspor Kota Kediri mempunyai kontribusi yang cukup besar, berkisar antara 62 hingga 65 persen, yang mengalami peningkatan peran selama 2019-2021, setelah itu turun dan pada tahun 2023 Net Ekspor menjadi 62,77 persen. Komponen Net Ekspor dalam PDRB Menurut Pengeluaran merepresentasikan kondisi perdagangan barang dan jasa antar wilayah. Net Ekspor yang positif menunjukkan bahwa perdagangan barang dan jasa yang keluar dari suatu wilayah nilainya lebih besar dibanding perdagangan barang dan jasa yang masuk ke wilayah tersebut. Pada periode tersebut, Net Ekspor Kota Kediri selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Kediri, walaupun dalam memenuhi kebutuhan domestiknya masih sangat membutuhkan produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor), namun nilai barang dan jasa yang diekspor ke luar wilayah Kota Kediri selama lima tahun terakhir nilainya selalu jauh lebih besar dibanding barang dan jasa dari luar wilayah yang masuk ke Kota Kediri (impor).

Kontribusi komponen konsumsi Pemerintah (PK-P) menempati urutan kecil dalam kontribusi komponen PDRB Pengeluaran Kota Kediri. Pada tahun 2019-2023 berada pada kisaran kurang dari 2 persen. Hal tersebut menunjukkan peran Pemerintah Kota Kediri dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Kontribusi setiap komponen pengeluaran terhadap pembentukan PDRB ADHB dapat dilihat pada Gambar 3.4. Dari gambar ini terlihat bahwa struktur pengeluaran pada periode 2019-2023 tidak mengalami perubahan secara signifikan.

Gambar 3.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023



*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebelum pandemi Covid-19 menyerang pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri selalu tumbuh di atas 5 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,47 persen (2019). Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mengalami kontraksi sebesar 6,25 persen dan selanjutnya pada dua tahun berikutnya, ekonomi Kota Kediri mengalami perbaikan dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 2,50 persen pada tahun 2021; 3,96 persen pada tahun 2022 dan melambat menjadi 1,92 persen pada tahun 2023.

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kediri (persen), 2019-2023

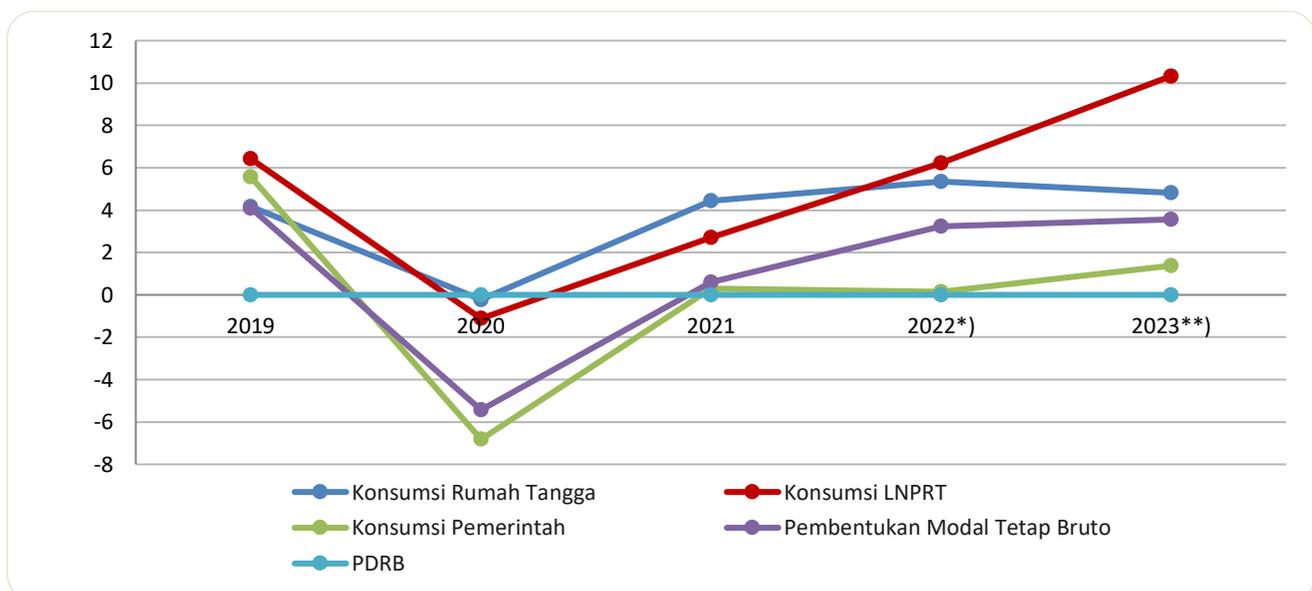
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	4,17	- 0,22	4,38	5,35	4,81
2 Konsumsi LNPRT	6,42	- 1,12	2,70	6,23	10,33
3 Konsumsi Pemerintah	5,57	- 6,82	0,29	0,14	1,38
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,10	- 5,43	0,60	3,24	3,55
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,47	- 6,25	2,50	3,96	1,92

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada periode lima tahun terakhir terjadi di tahun 2019 dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2023 (1,92 persen). Sedangkan kontraksi atau pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2020 sebesar minus 6,25 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri pada tahun 2020 disebabkan oleh terhambatnya kinerja ekonomi akibat wabah Covid-19 yang menerpa berbagai wilayah di dunia. Untuk lebih jelasnya gerak pertumbuhan komponen menurut pengeluaran dapat dilihat pada gambar 3.5. Gambar tersebut memperlihatkan pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama (selain komponen perubahan inventori dan net ekspor).

Gambar 3.5 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023



^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Indeks implisit⁶ PDRB Pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen akhir barang dan jasa (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Indeks implisit dapat digunakan untuk melihat inflasi dari sisi perekonomian secara makro.

Tabel 3.6 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	142,88	143,93	144,78	153,81	162,31
2 Konsumsi LNPRT	167,95	170,84	174,26	178,51	180,21
3 Konsumsi Pemerintah	163,81	154,22	160,81	151,22	155,59
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	138,76	139,14	139,47	145,72	151,54
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	154,71	156,93	163,57	169,95	174,34

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tujuan penghitungan indeks implisit adalah untuk melihat pertumbuhan harga tahun berjalan dibandingkan harga tahun dasar. Dari tabel 3.6 terlihat tingkat fluktuasi harga selama periode tahun 2019-2023, baik kenaikan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen. Indeks implisit selama lima tahun terakhir secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Indeks implisit Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai 174,34 persen yang menunjukkan adanya kenaikan harga sebesar 74,34 persen dibandingkan tahun 2010.

⁶ Indeks perkembangan

Tabel 3.7 Laju implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	2,82	0,73	0,59	6,23	5,53
2 Konsumsi LNPRT	1,63	1,72	2,00	2,44	0,95
3 Konsumsi Pemerintah	4,32	- 5,85	4,27	- 5,96	2,89
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,69	0,27	0,24	4,49	3,99
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3,38	1,43	4,24	3,89	2,60

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.7 memperlihatkan pertumbuhan harga menurut komponen. Secara umum pada tahun 2023 semua komponen mengalami penurunan harga barang dan jasa yang dikonsumsi sepanjang periode tersebut, kecuali komponen Konsumsi Pemerintah yang mengalami kenaikan harga barang dan jasa pada tahun 2023. Namun jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, indeks implisit tiap komponen mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini berarti di tiap tahun, harga barang dan jasa yang dikonsumsi tiap komponen pengeluaran meningkat dengan pertumbuhan yang berbeda-beda.

3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Pada umumnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Namun di Kota Kediri, dengan masih besarnya peranan industri pengolahan, menjadikan komponen net ekspor mendominasi nilai total PDRB. Jika pengaruh net ekspor dikurangkan terhadap pembentukan PDRB, maka data tabel 3.3 (distribusi PDRB ADHB tidak termasuk net ekspor) menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Kediri, sekitar 49 persennya masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk yang dihasilkan di wilayah Kota Kediri (domestik) maupun produk yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri (impor) akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Disebut konsumsi akhir rumah tangga (yang selanjutnya disebut sebagai konsumsi rumah tangga) karena sudah termasuk pengeluaran yang sumber dananya diperoleh dari Pemerintah.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga

khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok *COICOP* (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data pada tabel 3.8 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019-2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga cenderung mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2019-2021 porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB mengalami fluktuasi, yaitu dari 15,99 persen (2019) menjadi 16,90 persen (2020), turun menjadi 16,61 persen (2021), kemudian meningkat menjadi 17,21 persen (2022) dan 18,21 persen (2023)

Konsumsi rumah tangga ADHB Kota Kediri selama 2019-2023 terus meningkat. Pada tahun 2019, seluruh rumah tangga di Kota Kediri menghabiskan dana sebesar 22.263,86 miliar rupiah untuk pemenuhan kebutuhan konsumsinya. Selanjutnya, terjadi peningkatan konsumsi menjadi 22.377,11 miliar rupiah (2020); 23.495,87 miliar rupiah (2021); 26.297,11 miliar rupiah (2022) dan 29.086,68 miliar rupiah (2023).

Tabel 3.8 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Kota Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (miliar Rp)	22.263,86	22.377,11	23.495,87	26.297,11	29.086,68
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	15.581,85	15.547,13	16.228,24	17.097,12	17.920,02
Proporsi terhadap PDRB					
a. ADHB (persen)	15,99	16,90	16,61	17,21	18,21
b. ADHB tidak termasuk net ekspor (persen)	43,90	47,16	46,91	48,06	48,90
Rata-Rata Konsumsi perKapita/Tahun					
a. ADHB (ribu Rp)	77.383,80	78.024,48	81.265,44	89.977,26	98.523,77
b. ADHK 2010 (ribu Rp)	54.158,74	54.209,72	56.128,80	58.511,90	60.699,53
Pertumbuhan ⁷					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	4,17	-0,22	4,38	5,35	4,81
b. Konsumsi per kapita	3,40	0,09	3,54	4,25	3,74
Jumlah penduduk (000 orang)	287.707 ¹	286.796 ²	289.125 ³	292.199 ³	295.225 ³

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

¹Data penduduk hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

²Data penduduk hasil proyeksi penduduk Interim Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)

³Data penduduk hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK selama tahun 2019-2020 menunjukkan penurunan, karena pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 kemudian mengalami peningkatan lagi pada 2021-2023; dengan laju pertumbuhan per tahunnya sebesar 4,17 persen (2019); -0,22 persen (2020); 4,38 persen (2021); 5,35 persen (2022) dan 4,81 persen (2023).

Sedangkan pertumbuhan konsumsi perkapita selama tahun 2019-2023 juga mengalami perlambatan pada tahun 2020 dan tahun 2023, walaupun nilai pertumbuhannya masih bernilai positif. Pertumbuhan komponen Konsumsi perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,25 persen. Sebaliknya pertumbuhan konsumsi perkapita terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,09 persen.

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 berdampak pada terkontraksinya konsumsi rumah tangga pada tahun tersebut. Selama pandemi terjadi, masyarakat cenderung untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer dan menunda konsumsi kebutuhan sekunder ataupun tersier. Pengurangan konsumsi ini juga didorong oleh adanya indikasi penurunan pendapatan

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

masyarakat sebagai akibat terhambatnya kinerja ekonomi serta ruang gerak masyarakat selama pandemi.

3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Peranan konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dalam PDRB menurut pengeluaran sangatlah kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan peranan LNPRT dalam perekonomian yang dilihat dari proporsinya terhadap total PDRB.

Tabel 3.9 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (miliar Rp)	267,16	268,72	281,50	306,34	341,20
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	159,07	157,29	161,54	171,61	189,33
Proporsi terhadap PDRB ADHB (persen)	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21
Pertumbuhan (ADHK 2010)	6,42	-1,12	2,70	6,23	10,33

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Konsumsi LNPRT selama kurun waktu tahun 2019-2023 secara ADHB mengalami peningkatan, sedangkan secara ADHK terjadi penurunan konsumsi di tahun 2020. Tabel 3.11 memperlihatkan pada tahun 2019 konsumsi LNPRT sebesar 267,16 miliar rupiah; kemudian pada tahun-tahun berikutnya meningkat menjadi 268,72 miliar rupiah pada tahun 2020, tahun 2021 menjadi 281,50 miliar rupiah, tahun 2022 menjadi 306,34 miliar rupiah, serta tahun 2023 menjadi 341,20 miliar rupiah.

Proporsi konsumsi LNPRT dalam rentang waktu lima tahun terakhir relatif kecil, dengan kontribusi di bawah seperempat persen. Proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB Kota Kediri pada tahun 2019 hingga 2023 relatif stabil dengan kisaran 0,19 sampai 0,21 persen. Kegiatan berbagai lembaga kemanusiaan selama masa pandemik Covid-19 tidak banyak mempengaruhi tingkat konsumsi LNPRT pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2023 menjelang PEMILU 2024, konsumsi LNPRT ada peningkatan. Pertumbuhan konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 selama lima tahun terakhir

nilainya ternyata cukup fluktuatif; 6,42 persen (2019); -1,12 persen (2020); 2,70 persen (2021); 6,23 persen (2022); serta 10,33 persen pada tahun 2023.

3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Dalam perekonomian suatu wilayah, pemerintah memegang peranan yang penting. Untuk menjalankan roda perekonomian, unit pemerintah dapat berperan dalam aktivitas konsumsi barang dan jasa, aktivitas produksi barang dan jasa serta investasi, dan juga berperan sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan baik di bidang fiskal maupun moneter.

Dalam rentang lima tahun terakhir, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah berfluktuasi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2019 total konsumsi akhir pemerintah ADHB adalah sebesar 1.824,58 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1.600,61 miliar rupiah (2020); 1.673,88 miliar rupiah (2021); 1.576,24 miliar rupiah (2022); dan 1.644,22 miliar rupiah (2023). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami fluktuasi pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi fluktuasi pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Jika dilihat dari proporsi terhadap PDRB Kota Kediri, sepanjang tahun 2019 hingga 2023 kontribusi konsumsi akhir pemerintah cenderung tetap sekitar satu persen. Sepanjang periode ini, peran pemerintah stabil di kisaran 1,03 hingga 1,31 persen setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2023 proporsinya tetap 1,03 persen dibanding tahun 2022.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan konsumsi pemerintah seyogyanya juga diikuti oleh peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Nilai Konsumsi pemerintah per kapita ADHB 6.341,79 juta rupiah (2019); 5.581,02 juta rupiah (2020); 5.789,47 juta rupiah (2021); 5.394,41 juta rupiah (2022); dan 5.569,38 juta rupiah (2023).

Meskipun mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir, namun konsumsi pemerintah tahun 2020 lebih rendah apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 nilai konsumsi pemerintah ADHK 2010 turun 6,82 persen. Sementara itu nilai konsumsi pemerintah per kapita turun - 6,52 persen. Kontraksi konsumsi pemerintah pada tahun 2020 adalah kontraksi kedua sejak sepuluh tahun terakhir, setelah sebelumnya kontraksi terjadi pada tahun 2016. Berbeda dengan kontraksi konsumsi pemerintah tahun 2016 yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, kontraksi pada tahun 2020 dikarenakan oleh terhambatnya realisasi anggaran pemerintah akibat

pembatasan ruang gerak selama masa Pandemi Covid-19 serta adanya kebijakan realokasi anggaran pemerintah dalam rangka penanganan wabah.

Tabel 3.10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ¹⁾	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar Rp)	1.824,58	1.600,61	1.673,88	1.576,24	1.644,22
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	1.113,81	1.037,85	1.040,89	1.042,35	1.056,77
Proporsi terhadap PDRB					
ADHB (persen)	1,31	1,21	1,18	1,03	1,03
Konsumsi Pemerintah per-kapita					
a. ADHB (juta Rp)	6.341,79	5.581,02	5.789,47	5.394,41	5.569,38
b. ADHK 2010 (juta Rp)	3.871,32	3.618,76	3.600,14	3.567,26	3.579,54
Konsumsi Pemerintah per- pegawai Pemerintah Kota					
a. ADHB (juta Rp)	391,79	353,49	390,00	373,34	415,10
b. ADHK 2010 (juta Rp)	239,17	229,21	242,52	246,89	266,79
Pertumbuhan ⁸					
a. Total konsumsi pemerintah	5,57	- 6,82	0,29	0,14	1,38
b. per kapita	4,79	-6,52	-0,51	-0,91	0,34
c. per-pegawai	9,10	-4,17	5,81	1,80	8,06
Jumlah PNS ⁹⁾ (orang)	4.657	4.528	4.292	4.222	3.961
Jumlah penduduk (orang)	287.707 ¹	286.796 ²	289.125 ³	292.199 ³	295.225 ³

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

¹Data penduduk hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

²Data penduduk hasil proyeksi penduduk Interim Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)

³Data penduduk hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)

Catatan: Jumlah PNS Pemerintah Kota Kediri (Sumber : Kota Kediri Dalam Angka 2023)

Rata-rata konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah Kota Kediri menunjukkan kecenderungan meningkat, walaupun secara jumlah pegawai pemerintahan mengalami penurunan.

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

⁹ Tidak termasuk polisi dan militer

Pada tahun 2019 rata-rata konsumsi pemerintah terhadap jumlah pegawai Pemerintah Kota Kediri sebesar 391,79 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 353,49 juta rupiah (2020); 390 juta rupiah (2021); 373,34 juta rupiah (2022) dan menjadi 415,10 juta rupiah di tahun 2023.

Pada tingkat harga konstan 2010, indikator penyerapan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi pertumbuhan penyerapan per pegawai sebesar -4,17 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2023, pertumbuhan konsumsi pemerintah per pegawai kembali positif dengan angka pertumbuhan masing-masing sebesar 5,81 persen; 1,80 persen dan 8,06 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik ADHB maupun ADHK 2010. Namun demikian peningkatan konsumsi pemerintah tidak sejalan dengan jumlah pegawai pemerintah yang mengalami penurunan. Pada periode tahun 2019 sampai dengan 2023, jumlah pegawai pemerintah terus mengalami penurunan dengan jumlah pada masing-masing tahun sebesar 4.657 orang (2019); 4.528 orang (2020); 4.292 orang (2021); 4.222 orang (2022) dan 3.961 orang di tahun 2023.

3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kajian PDRB menurut pengeluaran ini, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik/aset produksi). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹⁰. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Dalam kurun waktu lima tahun, nilai PMTB Kota Kediri mengalami peningkatan yang pesat. Jika dinilai ADHB, PMTB Kota Kediri naik dari 23.033,56 miliar rupiah (2019) menjadi 25.583,01 miliar rupiah (2023) dan jika dinilai ADHK 2010, PMTB naik dari 16.599,74 miliar rupiah (2019) menjadi 16.882,38 miliar (2023).

Kontribusi PMTB terhadap perekonomian Kota Kediri berkisar antara 15-17 persen dari total PDRB. Dari sisi pertumbuhan riil, sepanjang tahun 2019 hingga 2023, secara umum PMTB mengalami pertumbuhan positif, hanya pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 4,10 persen, namun pada tahun 2020 kinerja PMTB terhambat oleh merebaknya virus Covid-19 di seluruh wilayah. Hal ini menyebabkan komponen PMTB tumbuh negatif sebesar 5,43 persen. Sementara di tahun 2022 dan 2023, PMTB kembali tumbuh positif masing-masing sebesar 3,24 persen dan 3,55 persen.

¹⁰ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 3.11 Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (miliar Rp)	23.033,56	21.841,36	22.024,97	23.759,07	25.583,01
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	16.599,74	15.697,94	15.792,31	16.304,12	16.882,38
Proporsi terhadap PDRB					
ADHB (persen)	16,54	16,50	15,57	15,55	16,01
Pertumbuhan ¹¹					
ADHK (persen)	4,10	-5,43	0,60	3,24	3,55

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan Perubahan Inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor barang dan jasa). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi perubahan inventori dalam PDRB pada umumnya

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2019, perubahan inventori ADHB sebesar 3.330,33 miliar rupiah, yang kemudian menurun pada tahun 2020, menjadi sebesar 1.360,43 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2023, nilai perubahan inventori meningkat lagi menjadi sebesar berturut-turut 2.614,65 miliar rupiah, 2.775.20 miliar rupiah dan 2.823,82 miliar rupiah.

Tabel 3.12 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (miliar Rp)	3.330,33	1.360,43	2.614,65	2.775,20	2.823,82
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	1.558,44	636,46	1.182,18	1.215,51	1.182,43
Proporsi terhadap PDRB					
ADHB (persen)	2,39	1,03	1,85	1,82	1,77

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Kontribusi Perubahan Inventori terhadap total PDRB di Kota Kediri tahun 2019 sebesar 2,39 persen dan turun menjadi 1,03 persen pada tahun 2020. Penurunan yang cukup tinggi ini didorong oleh pelemahan kegiatan ekonomi Kota Kediri selama masa pandemi Covid-19. Terhambatnya pasokan barang, dari luar wilayah berdampak pada penurunan nilai perubahan inventori. Selain itu, pemenuhan barang untuk konsumsi domestik dalam dan luar wilayah juga turut berpengaruh terhadap kondisi perubahan inventori Kota Kediri sepanjang tahun 2020. Kontribusi perubahan inventori pada tahun 2021 sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu mencapai 1,85 persen sampai setelah itu terus turun, pada tahun 2023 kontribusi perubahan inventori turun menjadi sebesar 1,77 persen.

3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Kediri, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten/kota lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor yaitu

pembelian oleh badan-badan internasional, awak kapal (udara maupun laut), dan non residen yang singgah dan sebagainya.

Sedangkan transaksi impor menjelaskan adanya tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk Kota Kediri di luar wilayah domisilinya, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Kediri terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Pada penghitungan ekspor-impor barang dan jasa tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor barang dan jasa juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, dan sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor barang dan jasa menjadi nilai ekspor barang dan jasa dan nilai impor barang dan jasa dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor-impor dengan metode *cross hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output bayangan. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan demand dan supply suatu perekonomian.

Tabel 3.13 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (miliar Rp)	88.525,38	84.957,82	91.376,26	98.064,36	100.271,01
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	54.988,61	51.298,31	52.080,43	54.076,49	54.400,41
Proporsi terhadap PDRB					
ADHB (persen)	63,58	64,16	64,59	64,19	62,77

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Secara total seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.15, pada tahun 2020 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar 84.957,82 miliar rupiah. Nilai tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 88.525,38 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2021, nilai net ekspor barang dan jasa kembali mengalami peningkatan sekitar 6.418,44 miliar menjadi 91.376,26 miliar rupiah. Pada tahun 2023, nilai net ekspor barang dan jasa sebesar 100.271,01 miliar. Sejalan dengan nilai net ekspor atas dasar harga berlaku, nilai net ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu 54.988,61 miliar rupiah (2019); lalu menurun menjadi 51.298,31 miliar rupiah (2020); kemudian meningkat lagi menjadi 52.080,43 miliar rupiah (2021); 54.076,49 miliar rupiah (2022) dan menjadi 54.400,41 miliar rupiah (2023).

Pada periode 2019 sampai dengan 2023, kontribusi terhadap PDRB menurun dari 63,58 persen pada tahun 2019 menjadi 62,77 persen di tahun 2023. Dapat dikatakan bahwa nilai PDRB Kota Kediri menurut pengeluaran lebih dari setengahnya berasal dari net ekspor barang dan jasa, yang bisa juga berarti bahwa barang dan jasa yang diproduksi di Kota Kediri sebagian besar dikonsumsi di luar wilayah ekonomi Kota Kediri.

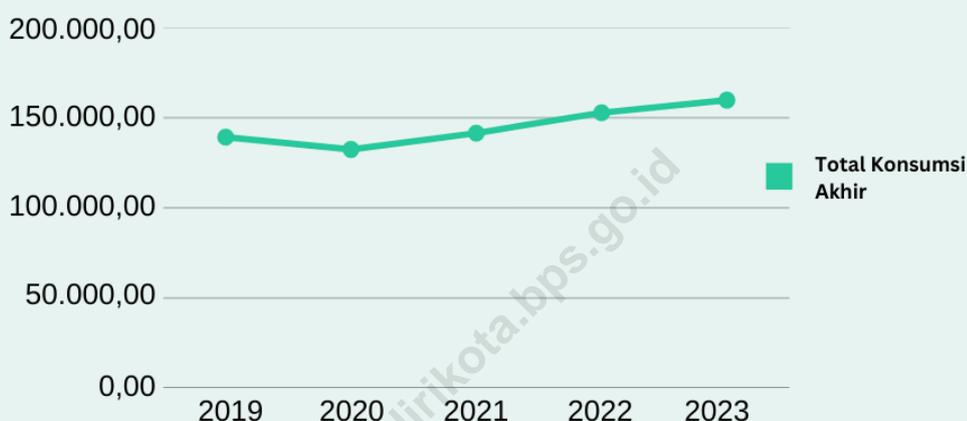


PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA KEDIRI 2019-2023



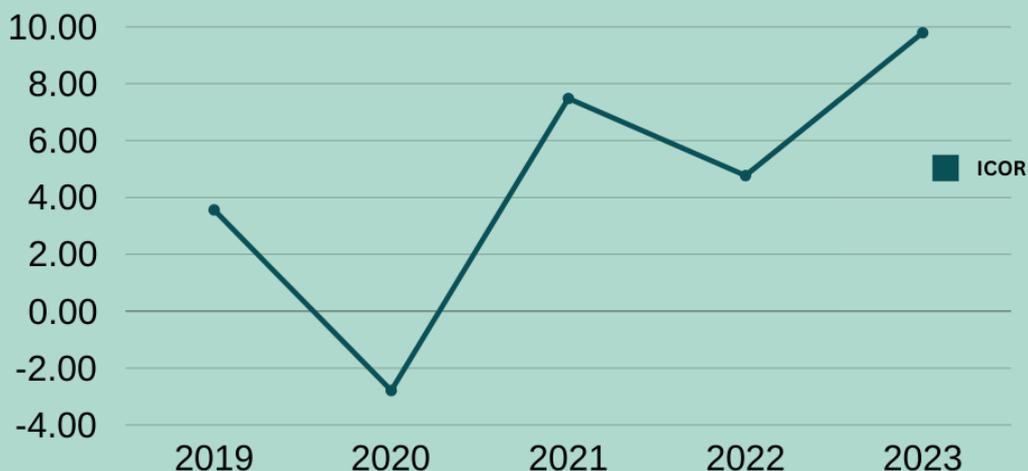
Konsumsi Akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah.

**Konsumsi Akhir (ADHB) Tahun 2019-2023
(Miliar Rupiah)**



"ICOR" jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia adalah Rasio Output Penambahan Modal Produksi. ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut.

**ICOR (INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO)
2019-2023**



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA KEDIRI 2019-2023

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Kediri, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari *series* data PDRB Pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (miliar Rp)	139.244,87	132.406,06	141.467,12	152.778,31	159.749,94
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	90.001,52	84.374,98	86.485,59	89.907,21	91.631,35
PDRB perkapita					
a. ADHB (ribu Rp)	483.981,53	462.198,70	489.293,97	522.857,06	541.112,51
b. ADHK 2010 (ribu Rp)	312.823,52	294.198,59	299.128,72	307.691,71	310.378,02
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	4,69	-5,95	1,68	2,89	0,87
Jumlah penduduk (orang)	287.707	286.796	289.125	292.199	295.225

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 4.1 menunjukkan peningkatan PDRB per kapita Kota Kediri dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Pada tahun 2020, pertumbuhan per kapita secara “riil” menurun dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 4,69 persen menjadi -5,95 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk. Tahun 2021 pertumbuhan PDRB per kapita kembali menunjukkan peningkatan walaupun belum mencapai kondisi tahun 2019, yaitu sebesar 1,68 persen. Sedangkan pada tahun 2023, pertumbuhan per kapita turun sebesar 0,87 persen.

4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan Konsumsi Akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Terkait dengan adanya perusahaan industri pengolahan berskala besar yang bukan merupakan pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga utama Kota Kediri, menjadikan barang yang dihasilkan lebih banyak untuk diekspor. Hal ini terlihat dari Tabel 4.2, tercatat tahun 2019 proporsi PDRB Pengeluaran untuk konsumsi akhir hanya mencapai 17,49 persen dan di tahun 2020 terjadi peningkatan kontribusi konsumsi akhir menjadi sebesar 18,31 persen. Kontribusi konsumsi akhir kembali menurun pada tahun 2021, yaitu mencapai 17,99 persen. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi sebesar 19,45 persen.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan ekspor (lebih dari 60 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB cenderung stabil. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau perubahan inventori) memiliki peran yang relatif kecil. Dari tiga pelaku konsumsi akhir, konsumsi terbesar dilakukan oleh rumah tangga diikuti pemerintah dan LNPRT.

Jika pengeluaran net ekspor dikeluarkan dari PDRB Kota Kediri dengan asumsi tidak ada barang impor yang digunakan oleh rumah tangga, LNPRT maupun Pemerintah, maka akan terlihat proporsi yang lebih nyata (riil) pada komponen konsumsi baik untuk konsumsi rumah tangga, lembaga non profit, maupun pemerintah. Tercatat proporsi untuk konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah berkisar antara 48 hingga 53 persen.

**Tabel 4.2 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Kediri,
2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
a. Rumah tangga (miliar Rp)	22.263,86	22.377,11	23.495,87	26.297,11	29.086,68
b. Lembaga Non Profit (LNPR) (miliar Rp)	267,16	268,72	281,50	306,34	341,20
c. Pemerintah (miliar Rp)	1.824,58	1.600,61	1.673,88	1.576,24	1.644,22
Jumlah	24.355,60	24.246,45	25.451,25	28.179,69	31.072,10
PDRB (ADHB)					
(miliar Rp)	139.244,87	132.406,06	141.467,12	152.778,31	159.749,94
Proporsi terhadap Total PDRB	17,49	18,31	17,99	18,44	19,45
Proporsi tanpa Net Ekspor	48,02	51,10	50,81	51,50	52,24

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

”ICOR” jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia adalah Rasio Output Penambahan Modal Produksi. ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ” Nilai Tambah.”

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Formula ICOR adalah sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Keterangan: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 4.3 Rasio Output Penambahan Modal Produksi Kota Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010)					
(miliar Rp)	90.001,52	84.374,98	86.485,59	89.907,21	91.631,35
Perubahan					
(miliar Rp)	4.663,84	-5.626,54	2.110,62	3.421,61	1.724,14
PMTB (ADHK 2010)					
(miliar Rp)	16.599,74	15.697,94	15.792,31	16.304,12	16.882,38
ICOR	3,56	-2,79	7,48	4,77	9,79

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Data pada Tabel 4.3 menunjukkan besaran *ICOR* mengalami fluktuasi dari sebesar 3,56 (2019); kemudian turun menjadi -2,79 (2020). Pada tahun 2020, nilai koefisien *ICOR* Kota Kediri bernilai negatif. Kondisi ini terjadi karena output yang dihasilkan selama tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan output yang dihasilkan pada tahun sebelumnya, meskipun investasi fisik masih terbentuk pada tahun tersebut. Penurunan nilai output ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang menghambat kinerja perekonomian Kota Kediri. Seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi pada tahun 2021, terjadi penambahan output sehingga nilai *ICOR* kembali pada posisi positif sebesar 7,48, kemudian turun menjadi 4,77 (2022). Serta pada tahun 2023, nilai *ICOR* Kota Kediri sebesar 9,79 persen.

5 PENUTUP

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut Pengeluaran tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Kediri pada periode tahun bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB Pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri/perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan data pegawai negeri sipil), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan lain sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut Pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan dalam bentuk net ekspor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Kediri terhadap ekonomi luar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *PDRB Menurut Pengeluaran*, berbagai seri, Jawa Timur
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
6. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
7. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
8. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
9. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
10. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
11. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
12. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

<https://medipedia.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri (miliar rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022^{*)}	2023^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	22.263,86	22.377,11	23.495,87	26.297,11	29.086,68
2 Konsumsi LNPRT	267,16	268,72	281,50	306,34	341,20
3 Konsumsi Pemerintah	1.824,58	1.600,61	1.673,88	1.576,24	1.644,22
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.033,56	21.841,36	22.024,97	23.759,07	25.583,01
5 Perubahan Inventori	3.330,33	1.360,43	2.614,65	2.775,19	2.823,82
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	88.525,38	84.957,82	91.376,26	98.064,36	100.271,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	139.244,87	132.406,06	141.467,12	152.778,31	159.749,94

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kediri (miliar rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022^{*)}	2023^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	15.581,85	15.547,13	16.228,24	17.029,12	17.920,01
2 Konsumsi LNPRT	159,07	157,29	161,54	171,61	189,33
3 Konsumsi Pemerintah	1.113,81	1.037,85	1.040,89	1.042,35	1.056,77
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.599,74	15.697,94	15.792,31	16.304,12	16.882,38
5 Perubahan Inventori	1.558,44	636,46	1.182,18	1.215,51	1.182,43
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	54.988,61	51.298,31	52.080,43	54.076,49	54.400,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	90.001,52	84.374,98	86.485,59	89.907,21	91.631,35

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kediri (persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022^{*)}	2023^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	15,99	16,90	16,61	17,21	18,21
2 Konsumsi LNPRT	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21
3 Konsumsi Pemerintah	1,31	1,21	1,18	1,03	1,03
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,54	16,50	15,57	15,55	16,01
5 Perubahan Inventori	2,39	1,03	1,85	1,82	1,77
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	63,58	64,16	64,59	64,19	62,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kediri (persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022^{*)}	2023^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	4,17	-0,22	4,38	5,35	4,81
2 Konsumsi LNPRT	6,42	-1,12	2,70	6,23	10,33
3 Konsumsi Pemerintah	5,57	-6,82	0,29	0,14	1,38
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,10	-5,43	0,60	3,24	3,55
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,47	-6,25	2,50	3,96	1,92

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Kota Kediri, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022^{*)}	2023^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	142,88	143,93	144,78	153,81	162,31
2 Konsumsi LNPRT	167,95	170,84	174,26	178,51	180,21
3 Konsumsi Pemerintah	163,81	154,22	160,81	151,22	155,59
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	138,76	139,14	139,47	145,72	151,54
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	154,71	156,93	163,57	169,95	174,34

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Kediri (persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022^{*)}	2023^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	2,82	0,73	0,59	6,23	5,53
2 Konsumsi LNPRT	1,63	1,72	2,00	2,44	0,95
3 Konsumsi Pemerintah	4,32	-5,85	4,27	-5,96	2,89
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,69	0,27	0,24	4,49	3,99
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3,38	1,43	4,24	3,89	2,60

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KEDIRI**

Jl. Penanggungan No. 14-C Kediri, Jawa Timur
Telp (0354) 77328/Faks (0354) 773119
Mailbox : bps3571@bps.go.id
Homepage : kedirikota.bps.go.id

